

**EVALUASI KUALITAS PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**

Sheilla Destania

NPP. 31.0208

Asdaf Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email: sheilladestania2@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Etin Indrayani, MT

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Regional Government Information System (SIPD) is a system for managing regional development information, regional financial information, and other interconnected regional government information to be utilized in the implementation of regional development. Then several problems were found related to the application of the SIPD application at BPKAD Sarolangun Regency, one of which was that it still experienced system errors when many people accessed this application, especially during working hours. Purpose:* This research was conducted to determine the quality of SIPD with Alvaro Rocha's theory as well as budgeting planning, and information system management. **Method:** *Research conducted by researchers using descriptive qualitative methods, it is hoped that this research can provide an objective picture of the application of SIPD in the financial management process, especially at the budgeting stage in Sarolangun Regency which is the locus of research focus. Data collection was done through interviews, documentation and observation. Data were analyzed using data triangulation. Result:* Based on the research conducted, it is found that it is good in terms of data accuracy and easy to access, but there are notes when evaluating through 3 indicators content quality, service quality, and technical quality, especially on network constraints and system error. **Conclusion:** *On the quality of the published information content, it is information that is in accordance with the provisions of applicable documents and regulations so that its accuracy is guaranteed. Then on updating information it is concluded that SIPD is not a website that is updated regularly because it is not a news or public relations website. On the quality of service for the reliability of SIPD, it has been running well to facilitate the process of regional financial management, but for availability at the beginning of use there are still some features that are still incomplete. On technical quality, especially for the accessibility of SIPD, it is quite easy to access and use by its users.*
Keywords: SIPD; Website Quality; Regional Financial Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah. Kemudian ditemukan beberapa masalah terkait penerapan aplikasi SIPD di BPKAD Kabupaten Sarolangun, salah satunya ialah masih mengalami error system ketika banyak yang mengakses aplikasi ini khususnya pada jam kerja. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kualitas SIPD dengan teori Alvaro Rocha serta perencanaan penganggaran, dan pengelolaan sistem informasi. **Metode:** Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran objektif terkait penerapan dari SIPD dalam proses pengelolaan keuangan khususnya pada tahap penganggaran di Kabupaten Sarolangun yang menjadi lokus fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data dianalisis dengan menggunakan triangulasi data. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa sudah baik secara akurasi data dan mudah untuk diakses namun terdapat catatan ketika dilakukan evaluasi melalui 3 indikator yaitu kualitas konten, kualitas layanan dan kualitas teknis. Terutama pada kendala jaringan dan error system. **Kesimpulan:** Pada kualitas konten informasi yang dipublikasikan merupakan informasi yang sesuai dengan ketentuan dokumen dan peraturan yang berlaku sehingga terjamin keakuratannya. Kemudian pada pembaharuan informasi disimpulkan bahwa SIPD bukanlah *website* yang dilakukan pembaharuan secara rutin dikarenakan bukan sebagai *website* berita atau hubungan masyarakat. Pada kualitas layanan untuk kehandalan SIPD sudah berjalan baik mempermudah proses pengelolaan keuangan daerah, namun untuk ketersediaan pada awal-awal penggunaan masih ada beberapa fitur yang masih belum lengkap. Pada kualitas teknis khususnya untuk aksesibilitas dari SIPD sudah cukup mudah diakses dan digunakan oleh penggunanya.

Kata kunci: SIPD; Kualitas Website; Pengelolaan Keuangan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem data merupakan sebuah sistem yang mendapatkan penambahan data ataupun masukan informasi serta intruksi, mengolah informasi sesuai dengan intruksi serta mengeluarkan hasilnya (Alfani et al, 2022). Sistem informasi menjadi salah satu bagian dari perkembangan teknologi informasi yang mana teknologi informasi juga dimanfaatkan dan digunakan oleh pemerintah guna meningkatkan efisiensi kinerja dalam pelayanan publik secara optimal, salah satu sektor pemerintah yang menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi ini adalah sektor penganggaran Kabupaten Sarolangun yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun. Salah satu unsur keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah mampu memproses sistem pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu visi dan misi dari pemerintah daerah agar tuntutan masyarakat tercapai yaitu kesejahteraan terhadap masyarakat itu sendiri. BPKAD Kabupaten Sarolangun dalam mendukung kegiatan tersebut menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengintegrasikan antara perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah menggunakan aplikasi E-Planning oleh BAPPEDA Kabupaten Sarolangun dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang digunakan oleh BPKAD Kabupaten Sarolangun. Hal demikian dinilai kurang efektif dan efisien dikarenakan data yang di *input* memakan waktu yang cukup banyak, untuk menghindari hal tersebut Kementerian dalam Negeri membentuk aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Sistem informasi ini telah terintegrasi dalam satu jaringan yang menghubungkan pemerintah daerah dengan Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah sehingga data program dan anggaran dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat diawasi oleh Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah

Daerah (SIPD) menjelaskan bahwa pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dan wawancara pendahuluan dengan bagian tenaga operator BPKAD Kabupaten Sarolangun, SIPD mulai diterapkan di BPKAD Kabupaten Sarolangun yaitu pada Oktober 2020, kemudian ditemukan beberapa masalah terkait penerapan aplikasi SIPD di BPKAD Kabupaten Sarolangun, karena sebelumnya BPKAD Kabupaten Sarolangun menggunakan aplikasi SIPKD, namun dengan adanya aturan yang baru dari Kemendagri yang mengharuskan seluruh perangkat daerah di seluruh Indonesia menerapkan SIPD. Penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Sarolangun sekarang ini sudah sampai tahap penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban, tetapi masih banyak pegawai dan staff yang masih kurang paham dalam penerapan SIPD, seringkali para staf melewati salah satu proses penambahan data sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran tertunda, dan sistem penggajian menjadi terhambat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kualitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKAD Kabupaten Sarolangun ini. Dalam kegiatan pelaksanaannya SIPD semua Perangkat Daerah harusnya memiliki peralatan penunjang dalam penerapannya baik dari kelengkapan peralatan perangkat, pemrograman, dan juga jaringan web internet yang lancar dan baik karena menggunakan basis informasi yang hebat tapi jika tidak diimbangi dengan peralatan penunjang dan sumber daya manusia serta sumber daya finansial yang hebat juga maka tidak akan berjalan lancar sesuai harapan. Selain masalah sumber daya manusia yang masih kurang potensial, terdapat juga kendala dalam menyusun dan mengelola data SIPD yaitu kekurangan data data elektronik yang disediakan oleh organisasi perangkat daerah lain, serta perawatan server jika terjadi kesalahan teknis seperti adanya serangan *hacker* atau virus yang dapat menghambat kerja sistem dari SIPD. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sendiri masih mengalami *error system* ketika banyak yang mengakses aplikasi ini khususnya pada jam kerja sehingga sering kali staf atau operator SIPD untuk BPKAD melakukan penambahan data pada malam hari agar tidak mengalami *error system*.

Sistem informasi ini telah terintegrasi dalam satu jaringan yang menghubungkan pemerintah daerah dengan Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah sehingga data program dan anggaran dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat diawasi oleh Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjelaskan bahwa pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Setiap pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota diharapkan mampu menerapkan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diterapkan guna terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dalam pemerintahan yang baik serta terwujudnya penilaian Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan.

Gambar 1

Tampilan Awal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti 2024

Pentingnya peranan SIPD dalam meningkatkan perencanaan pembangunan dan penganggaran belanja daerah serta agar terciptanya pemerintahan berbasis elektronik, maka dari itu SIPD tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan dengan tepat dan optimal. Maka perlu diketahui bagaimana aplikasi SIPD dalam membantu proses pengolahan data perangkat daerah yang digunakan untuk acuan dalam penyusunan penganggaran, bagaimana kondisi sistem, serta kualitas dari penerapan SIPD ini.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Analisis Evaluasi Kualitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan ISO/IEC 25010 di BAPPEDA Provinsi Gorontalo (Setiawan et al, 2023), penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan hasil penelitian berupa pengelolaan SIPD sudah dilakukan dengan baik dan ditunjang dengan sumber daya yang memadai yang berupa petugas yang kompeten serta ketersediaan perangkat dan jaringan.

Penelitian selanjutnya yaitu tentang Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu (Adisi et al, 2022). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian berupa Pelaksanaan SIPD pada BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu sudah cukup efektif pelaksanaannya, tetapi masih terdapat kendala pada SDM, error jaringan saat penggunaan.

Penelitian selanjutnya yaitu Pengaruh Tampilan Web dan Harga Terhadap Minat Beli Dengan Kepercayaan Sebagai Intervening Variable Pada E-Commerce Shopee (Japarianto et al, 2020). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil berupa Seluruh variable dalam penelitian ini menunjukkan suatu pengaruh, namun berdasarkan path coefficient menunjukkan bahwa dalam penelitian ini kepercayaan ~~memperlemah~~ hubungan antara variable independen yang merupakan tampilan web dan harga terhadap variable dependen yang merupakan minat beli, melainkan hubungan secara langsung antara variable independen ke variable dependen lebih kuat.

Penelitian selanjutnya yaitu Evaluasi Aksesibilitas Website Covid19.Kaltimprov.Go.Id Menggunakan Sortsite 5.3.5 (Irawan et al, 2020). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan alat pengujian yaitu aplikasi SortSite 5.3.5 dengan hasil didapatkan bahwa tingkat aksesibilitas covid19.kaltimprov.go.id tergolong bermasalah karena terdapat 85% permasalahan dengan tingkatan atau level yang beragam pada 1065 halaman website.

Aksesibilitas yang bermasalah ini jika tidak segera ditangani dikhawatirkan bisa menghambat aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan informasi resmi terkait pandemi di Kalimantan Timur.

Penelitian selanjutnya yaitu Evaluasi Kegunaan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Menggunakan Metode Website Usability Evaluation (Alfitri, 2020). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan WebUse, hasil penelitian ini berupa evaluasi Simak Univrab dari segi Usability menggunakan metode WEBUSE didapatkan jumlah poin keseluruhan sebesar 0.77. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Simak termasuk kedalam kategori Baik yang berarti Simak sudah dapat diterima oleh pengguna karena kurangnya kesalahan pada simak dan juga mempermudah proses kegiatan akademik kampus. Dimensi usability yang berperan penting berdasarkan hasil olah data kuesioner yaitu Navigation and Link, karena Navigation and link merupakan sesuatu yang penting keberadaannya dalam suatu sistem dengan itulah pengguna dapat leluasa menjelajah dan mencari informasi. Hal ini menunjukkan simak efektif dan efisien dalam membantu pengguna mencari dan mengakses informasi.

Penelitian selanjutnya yaitu Analisis Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan metode End User Computing Satisfaction (EUCS) (Akhirudin et al, 2023), penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode EUCS. Hasil dari penelitian ini adalah Kepuasan Pengguna SIPD pada BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan Metode EUCS disimpulkan bahwa pengguna merasa puas.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Evaluasi Kualitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori Kualitas Website milik Alvaro Rocha (2012) yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu kualitas konten, kualitas layanan, kualitas teknik.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui kualitas dari penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun serta faktor penghambat yang mempengaruhi kualitas dari penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

II. METODE

Desain penelitian adalah penelitian yang dilaksanakan dengan kerangka kerja yang sistematis (Nurdin et al, 2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk memahami dan menyelidiki implikasi terkait masalah sosial ataupun masalah kemanusiaan (Creswell, 2016). Teori yang digunakan yaitu teori kualitas website Alvaro Rocha dengan memiliki tiga dimensi yaitu kualitas konten, kualitas layanan, dan kualitas teknik (Rocha, 2012).

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu data primer dan data sekunder. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari kepala badan BPKAD Kabupaten Sarolangun, sekretaris badan, kepala bidang perencanaan anggaran daerah BPKAD Kabupaten Sarolangun, kepala sub bidang perencanaan anggaran daerah, dan pejabat fungsional pranata komputer ahli muda. Informan wawancara

didapatkan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Instrumen penelitian dari penelitian ini yaitu peneliti sendiri dengan bantuan alat pendukung penelitian lainnya. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian peneliti menggunakan uji keabsahan data berupa triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan dengan cara menyatukan berbagai data dan sumber yang didapat (Sugiyono, 2015).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan analisis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian yang dilakukan. Terdapat tiga tujuan dari penelitian ini yaitu:

3.1. Kualitas Penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun

Penulis melakukan evaluasi terkait kualitas penerapan dari aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan teori kualitas *website* Alvaro Rocha (2012) yang terdiri dari tiga dimensi yaitu:

3.1.1. Kualitas Konten

Kualitas konten yaitu dimana *website* harus diperhatikan apa saja isi yang ada didalamnya. Pengunjung akan merasa puas jika isi yang ditampilkan dari *website* tersebut memberi manfaat pada pengunjung *website* tersebut. *Website* wajib memiliki konten data dan informasi yang berkualitas baik serta memberikan kenyamanan kepada pengguna dalam mendapatkan informasi yang diperlukan (Pamungkas et al, 2019). Kualitas konten sendiri memiliki beberapa indikator yaitu:

1. Keakuratan Informasi

Akurasi informasi pada sebuah *website* sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas *website*. Akurasi informasi atau akurasi data mengacu pada informasi yang telah ada dan sesuai sehingga informasi tersebut dapat digunakan secara bergantian (Kandari,2010), karena akurasi data pada *website* tersebut mengacu pada tingkat ketepatan dan kebenaran sebuah informasi dan data tersebut, maka aplikasi *website* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai media pengelolaan keuangan daerah secara digital harus dipastikan memiliki data yang akurat dan benar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat merupakan informasi yang benar adanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memiliki informasi yang sama antara di *website* dan data yang ada di kantor.

2. Relevansi Informasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam memberikan informasi yang relevan dengan kebutuhan publik melalui aplikasi *website* SIPD sudah relevan dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah kepada perangkat daerah terkait dan masyarakat, melalui koordinasi dari Bappeda yang berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau Rencana Kerja (Renja) yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Bidang Perencanaan Anggaran Daerah yang proses tersebut didapati yaitu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa aplikasi *website* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKAD Kabupaten Sarolangun sudah relevan dalam proses pengelolaan keuangan daerah khususnya pada tahap penganggaran, karena dengan melalui digitalisasi bagi pengelolaan keuangan daerah sangat mempermudah dalam penginputan anggaran.

3. Kelengkapan Informasi

Kelengkapan informasi didefinisikan sebagai *website* mempunyai informasi yang lengkap dan terperinci. Kelengkapan informasi pada suatu *website* dapat meningkatkan kepercayaan kepada pengunjung (Japarianto et al , 2020).

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan aplikasi *website* SIPD ini diketahui bahwa informasi yang tersedia dalam *website* tersebut berupa informasi mengenai perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan sistem informasi pemerintahan lainnya. Untuk informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah tersedia mulai dari tahap penganggaran hingga tahap akhir yaitu tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa mengenai kelengkapan informasi pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sudah dipastikan lengkap, dikarenakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sendiri berisi tentang informasi pengelolaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang sangat penting terhadap peningkatan pembangunan daerah.

4. Pembaharuan Informasi

Pembaharuan informasi diartikan sebagai layanan berupa informasi yang diberikan telah dilakukan pembaharuan. Proses ini merupakan kegiatan sederhana namun sulit diatur karena data dan informasi di internet dapat berubah setiap detik. Tujuan dari pembaharuan informasi sendiri tidak hanya untuk menjaga kualitas data dan informasi yang ada, tetapi juga dapat memastikan bahwa data atau informasi yang tersimpan telah akurat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pembaharuan informasi yang dilakukan yaitu apabila saat-saat tertentu saja, seperti waktunya penginputan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga tidak terjadi pembaharuan informasi seperti fungsi *website* pada media pemberitaan informasi masyarakat. Kemudian pada tahapan penganggaran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dilakukan penginputan pada saat penyusunan anggaran, pergeseran anggaran dan perubahan anggaran.

3.1.2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan pengukuran kualitas dari *website* tersebut dengan memperhatikan beberapa indikator yang memenuhi harapan atau keinginan dari pengguna *website*.

1. Keandalan

Keandalan dapat diartikan yaitu kesesuaian suatu *website* dalam bekerja tanpa adanya kegagalan dari *system* tersebut. *Reliability* (keandalan) pada *website* merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan, serta memiliki atribut fisik yang menunjang kinerja (Muhsin et al, 2017). Keandalan tidak hanya menyangkut mengenai sumber daya manusia yang menjalankan *website* tersebut. Komunikasi yang baik antar sumber daya manusia dapat meminimalkan kesalahan dalam pengembangan dan operasionalisasi dalam sistem Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta memudahkan apabila ada masalah yang muncul terkait SIPD.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa keandalan aplikasi *website* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini didapatkan bahwa SIPD cukup handal dalam tahap proses perencanaan anggaran serta telah membantu proses penganggaran dan meningkatkan efisiensi waktu. Aspek keandalan ini menilai kualitas komunikasi antara pengembang sistem dan pengguna sistem SIPD ini sendiri yaitu pegawai BPKAD dalam pelaksanaan implementasi SIPD Keuangan Daerah.

2. Ketersediaan

Website berfungsi sebagai media penyalur informasi untuk publik yang tentunya sudah disediakan berbagai fitur untuk digunakan bagi pengguna *website* tersebut. Untuk *website* SIPD sendiri mengenai ketersediaan fitur sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna *website*, terutama untuk informasi yang tersedia setiap saat dan informasi secara berkala. Melalui aplikasi *website* SIPD ini pengguna dapat memproses perencanaan kegiatan yang telah diusulkan oleh Bappeda untuk dilakukan perencanaan anggaran terkait kegiatan tersebut, yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dalam penginputan anggaran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sudah tersedia secara baik, tersedianya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sangat membantu BPKAD Kabupaten Sarolangun khususnya pada tahap penganggaran

3.1.3. Kualitas Teknis

Kualitas teknis yaitu evaluasi terkait bagaimana konten dan layanan disusun dan tersedia di suatu *website* tersebut.

1. Kegunaan

Kegunaan bagi *website* didefinisikan yaitu dapat memberikan manfaat kepada pengguna. Kegunaan dapat juga diartikan sebagai kemudahan penggunaan suatu *website* tersebut seberapa efektif penggunaan *website* tersebut. Kegunaan merupakan aspek penting terkait dengan produk perangkat lunak serta mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan dari suatu *website* (Alfitri, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa *website* SIPD khususnya pada tahap penganggaran yaitu digunakan untuk penyusunan anggaran, pergeseran anggaran tahun berjalan, dan perubahan anggaran. dapat diketahui bahwa pelaksanaan sistem dalam SIPD berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dari pemerintah daerah. Pelaksanaan SIPD yang baik dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pelaksanaan tugas pemerintah daerah, seperti perencanaan yang lebih baik, pengelolaan anggaran yang efektif serta pelaporan dan evaluasi kinerja yang efisien.

2. Aksesibilitas

Aksesibilitas didefinisikan sebagai keterjangkauan *website* oleh pengguna dengan kemudahan akses pada informasi yang ada dalam *website* tersebut (Irawan et al, 2020). Kemudahan akses atau aksesibilitas merupakan informasi yang diperoleh saat dibutuhkan. Kemudian bagaimana hambatan yang ditemui saat proses memperoleh informasi adalah sebagai bentuk dari tingkat kemudahan pengaksesan suatu informasi (Almira, 2017). Aksesibilitas juga diartikan sebagai kemungkinan bagi setiap orang untuk dapat mengakses isi dari *website* tersebut, sehingga sedikit banyak menentukan lalu lintas pengguna *website*. Selain itu, suatu *website* juga harus dapat memberikan kemudahan bagi penggunaannya dalam mengakses dan memahami konten yang tersedia. Kecepatan dan waktu *loading* pada *website* juga tidak kalah penting.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa akses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah cukup mudah, tetapi apabila sudah waktunya penginputan dan seperti yang kita tahu yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ialah seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia jadi wajar saja jika di akses pada jam kerja akan mengalami *server down*.

3.2 Faktor Penghambat Kualitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dalam penerapannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam melaksanakan pengelolaan penganggaran keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kabupaten Sarolangun, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Namun tetap masih ada hambatan atau kendala yang dihadapi oleh BPKAD Kabupaten Sarolangun khususnya pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah yang melaksanakannya. Hambatan yang ditemui antara lain:

- a. Pengadaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan kebijakan dari penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang masih belum disesuaikan.
- b. Masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun mengenai penerapan SIPD ini, sehingga berpengaruh terhadap Sumber Daya Manusia yang menjalankan kebijakan penerapan SIPD.
- c. Jaringan juga merupakan salah satu hambatan yang dialami dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga para staf Bidang Perencanaan Anggaran Daerah harus lembur melakukan penginputan APBD.
- d. Belum kesesuaiannya pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi masing-masing pegawai, yang dimaksud adalah mereka yang seharusnya memiliki tanggung jawab akan pelaksanaan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan (SIPD) akan tetapi dikarenakan masih belum menguasai teknologi informasi.
- e. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) khususnya pada tahap penganggaran yaitu masih ditemukannya *error system*, seperti pada awal awal penggunaan ialah standar harganya sempat hilang dari aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, informasi yang dipublikasikan merupakan informasi yang sesuai dengan ketentuan dokumen dan peraturan yang berlaku sehingga terjamin keakuratannya. Untuk akses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah cukup mudah, tetapi apabila sudah waktunya penginputan dan seperti yang kita tahu yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ialah seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia jadi wajar saja jika di akses pada jam kerja akan mengalami *server down*.

Sumber daya manusia yang belum dapat dikatakan baik, masih terjadi error jaringan saat penggunaan SIPD sehingga menghambat dalam penginputan, dan pada bagian pembuatan template juga sering terkendala (Adisi et al, 2022) sama halnya dengan temuan yang peneliti temui bahwa penerapan dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah masih mengalami beberapa kendala seperti error jaringan.

Kemudian masih menunjukkan terdapat banyak kendala, salah satu kendala yaitu terjadinya kendala di dalam penginputan data (Setiawan et al, 2023), kondiaai tersebut sama seperti penelitian yang peneliti lakukan pada awal awal penggunaan SIPD masih terdapat fitur fitur atau menu yang masih belum lengkap sehingga menghambat penginputan data.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat yang mempengaruhi kualitas dari penerapan aplikasi SIPD di BPKAD Kabupaten Sarolangun ini yakni sarana dan prasarana yang masih belum memadai, kurangnya sosialisasi mengenai SIPD kepada pegawai, terkendala jaringan saat mengakses SIPD, pada tahap penganggaran di awal penggunaan masih ditemukan *error system*.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa kualitas dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara keseluruhan berdasarkan teori Alvaro Rocha melalui 3 dimensi yaitu Kualitas Konten, Kualitas Layanan, dan Kualitas Teknis. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan *website* yang didesain untuk pengelolaan pemerintahan daerah yang terdiri dari perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah bukan *website* berita terkait masyarakat. Pada kualitas konten informasi yang dipublikasikan merupakan informasi yang sesuai dengan ketentuan dokumen dan peraturan yang berlaku sehingga terjamin keakuratannya. Kemudian pada pembaharuan informasi disimpulkan bahwa SIPD bukanlah *website* yang dilakukan pembaharuan secara rutin dikarenakan bukan sebagai *website* berita atau hubungan masyarakat. Pada kualitas layanan untuk kehandalan SIPD sudah berjalan baik mempermudah proses pengelolaan keuangan daerah, namun untuk ketersediaan pada awal-awal penggunaan masih ada beberapa fitur yang masih belum lengkap. Pada kualitas teknis khususnya untuk aksesibilitas dari SIPD sudah cukup mudah diakses dan digunakan oleh penggunanya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam melaksanakan penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu perangkat daerah saja yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan Teori Alvaro Rocha (2012).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan evaluasi kualitas dari penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Sarolangun untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kedua orang tua tercinta, dosen pembimbing, segenap dosen pengajar, pelatih dan pengasuh serta seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan tak lupa kepada Kepala Badan BPKAD Kabupaten Sarolangun beserta jajarannya yang telah memberikan peneliti dalam melaksanakan penelitian, serta pihak pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas program sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 150-164.
- Akhiruddin, D. R., Negara, E. S., Sutabri, T., & Herdiansyah, M. I. (2023). Analisis Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Dengan Metode End-User Computing Satisfaction (EUCS). *Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer*, 9(2), 834-848.
- Alfitri, B. (2020). Evaluasi kegunaan sistem informasi akademik Universitas Abdurrah menggunakan metode website usability evaluation. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ali Muhsin and Dinda Amanda Zuliestiana, 'Analisis Pengaruh Kualitas Website (*Webqual*) 4.0 Terhadap Kepuasan Pengguna Bukalapak Di Kota Bandung', *EProceedings of Management*, 4.3 (2017).

- Creswell, John W, and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (Sage publications, 2016)
- Dela Alfani and Juliana Nasution, 'Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.1 (2022), 4036-43.
- Irawan, B., & Hidayat, M. N. (2020). Evaluasi aksesibilitas website covid19. kaltimprov. go. id menggunakan sortsite 5.3. 5. *Jurnal Paradigma (JP)*, 9(2), 119-130.
- Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Media Sahabat Cendekia, 2019).
- Jaikrit Kandari, 'Information Quality on the World Wide Web: A User Perspective', 2010.
- Japarianto, E., & Adelia, S. (2020). Pengaruh tampilan web dan harga terhadap minat beli dengan kepercayaan sebagai intervening variable pada e-commerce shopee. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 14(1), 35-43.
- Pamungkas, R., & Saifullah, S. (2019). Evaluasi Kualitas Website Program Studi Sistem Informasi Universitas PGRI Madiun Menggunakan Webqual 4.0. *INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi*, 3(1), Hal 22-31.
- Rocha, A. (2012). Framework for a global quality evaluation of a website. *University Fernando Pessoa, Porto, Portugal, March 2012*
- Setiawan, Z., Amali, L. N., & Polin, M. (2023). Analisis Evaluasi Kualitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan ISO/IEC 25010 di BAPPEDA Provinsi Gorontalo. *Diffusion: Journal of Systems and Information Technology*, 3(1), 142-152.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Tiara Devi Almira, 'Analisis Kualitas Informasi Konten Website Repositori Perpustakaan Universitas Airlangga (Studi Deskriptif Tentang Kualitas Informasi Konten Situs Web Repositori Universitas Airlangga Bagi Pengguna Berdasarkan Pendekatan Dimensi Kualitas Informasi)' (Universitas Airlangga, 2017). Hal 5.